

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN NELAYAN**

(Studi kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. HENDRA MULYADI
NIM : 160801038

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Hendra Mulyadi

NIM : 160801038

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Nelayan (Studi kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 10 April 2023

Yang Menyatakan,



T. Hendra Mulyadi

**“PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN NELAYAN
(Studi kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam) “**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

T. HENDRA MULYADI
NIM. 160801038

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309212000032004


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc.
NIDN. 2008048903

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGGULANGI FENOMENA KEMISKINAN NELAYAN
(Studi kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023 M


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309212000032004


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc.
NIDN. 2008048903

Penguji I

Penguji II


Mumtazur SIP., M.A
NIP. 198609092014032002


Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam). penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan nelayan di gampong Lampulo dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di gampong Lampulo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan di Lampulo dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil (nelayan buruh) Gampong Lampulo yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan nelayan, pemberian bantuan berupa barang untuk mendukung nelayan dalam penangkapan ikan, membangun sarana dan prasarana demi kelancaran aktivitas nelayan sehari-hari, serta pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan kecil. Dalam menjalankan programnya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan nelayan, adapun faktor faktor penghambatnya yaitu: keterbatasan dana, tingkat pendidikan nelayan rendah serta kurangnya partisipasi nelayan serta adanya masalah administrasi kependudukan masyarakat nelayan di lampulo.

Kata Kunci: *Kemiskinan nelayan, Peran pemerintah Kota Banda Aceh, penanggulangan kemiskinan nelayan, Gampong Lampulo,*



KATA PENGANTAR

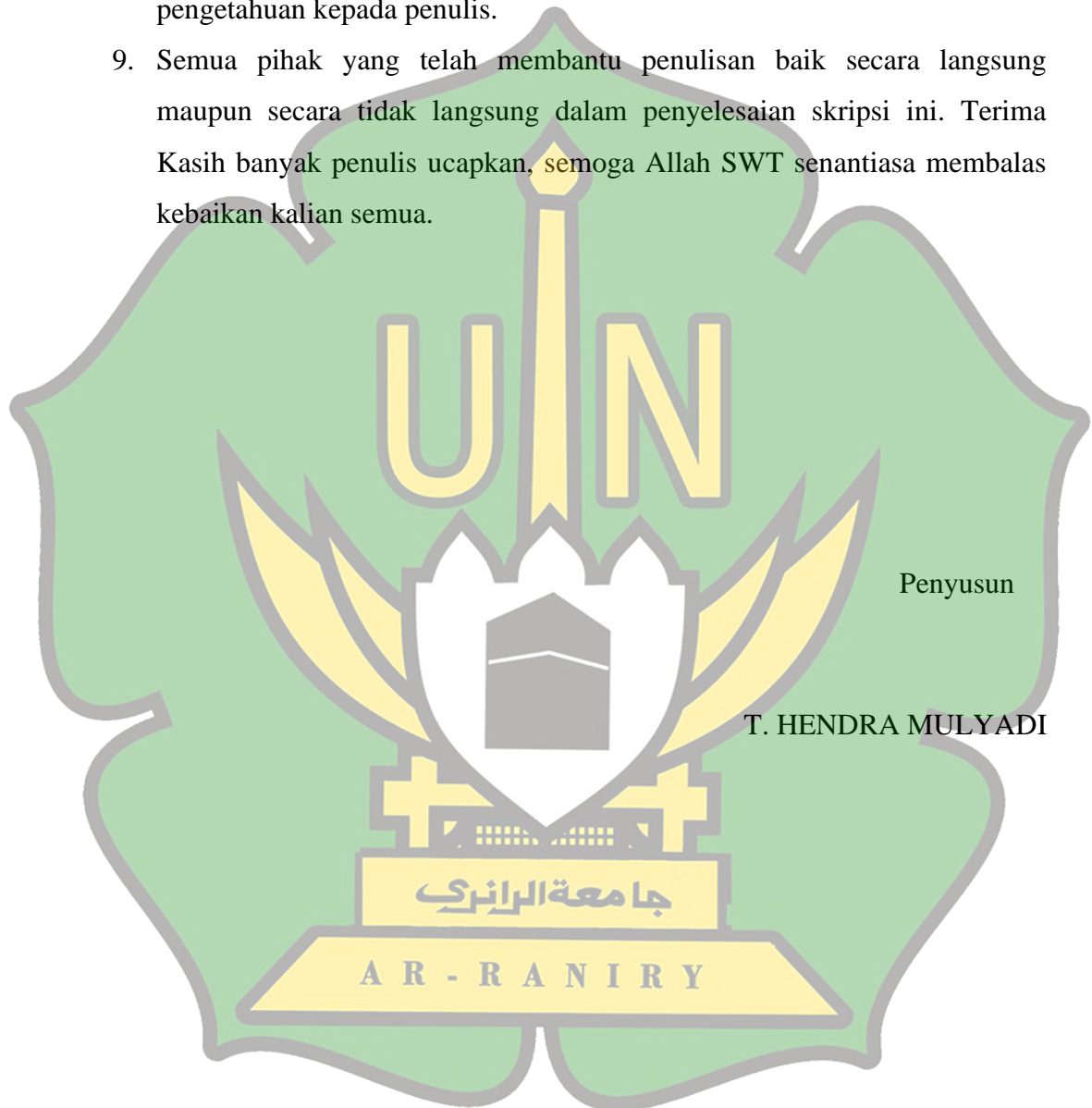
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam)” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Bapak Ramzi Murziqin. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik yang bersedia memberikan waktunya untuk membantu Menyusun laporan ini
5. Eka Januar, S.I.P., M.Soc., SC. Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
8. Kepada orang Tua dan Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian yang relavan	7
2.2. Landasan Konseptual	12
2.3. Kemiskinan	12
2.3.1. Kemiskinan Struktural	14
2.3.2. Kemiskinan Kultural	15
2.3.3. Kemiskinan Alamiah	16
2.3.4 Kemiskinan Nelayan	17
2.4. Pemerintahan.....	17
2.4.1. Kebijakan Publik	20
2.4.2. Implementasi Kebijakan Publik	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	36
4.1. Profil Lokasi Penelitian.....	36
4.4.1. Profil Kota Banda Aceh	38
4.4.2. Profil Gampong Lampulo	40
4.2. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Nelayan Di Gampong Lampulo	44
4.3.Faktor Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Di Gampong Lampulo	52
4.4. Analisis.....	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar. Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai sumber daya hayati yang bervariasi yakni terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut dan berbagai jenis ikan yang melimpah. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki sumber daya hayati yang melimpah tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah tersebut mayoritas berada dalam ambang batas kemiskinan serta menyumbang 25% angka kemiskinan nasional berdasarkan data dari Kementerian Kelautan tahun 2018. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar yaitu Provinsi Aceh. Namun dengan potensi tersebut ternyata masih banyak masyarakat nelayan yang hidup dibawah garis kemiskinan.¹

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar, yang didukung oleh panjang garis pantai sekitar 1.660 km, luas wilayah laut sebesar 295.370 km², dengan 56.563 km² selebihnya adalah daerah teritorial dan kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya sekitar 238.807 km. Melalui potensi tersebut produksi

¹ Kelautan, K.. Kementerian Kelautan, *Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Jakarta 2018

perikanan laut di Aceh selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.² Aceh merupakan salah satu daerah yang dianugerahi potensi perikanan dan kelautan dengan panjang garis pantai 1.660 km dan luas wilayah laut 295.370 km², terdiri dari 56.563 km² daerah laut teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² daerah laut teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya: Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Selain itu masyarakat nelayan yaitu pekerjaan yang tidak tetap karena sangat bergantung

² Aceh dalam angka, 2017

³Serambi Indonesia, “ *Melarat di darat, meukarat di laot* “, (14/06/2014). Di unduh pada tanggal (18/12/20)

pada musim, kemiskinan nelayan juga diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, serta teknologi yang digunakan karena sebagian besar nelayan yang ada di Indonesia masih nelayan tradisional. Maka dari itu, perlunya pemberdayaan untuk nelayan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.⁴

Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi mereka.⁵ Dari masalah kemiskinan nelayan sebagaimana dikemukakan di atas juga dapat dijumpai pada masyarakat nelayan khususnya di wilayah Kecamatan Kuta Alam khususnya di Gampong Lampulo.

**Tabel Jumlah Nelayan Buruh
Gampong Lampulo, Banda Aceh**

No.	Kategori Boat Nelayan	Jumlah Nelayan Buruh/ Anak Buah Kapal (ABK)
	Boat 59 GT.UP	3.584 Orang
2.	Boat 10-30 GT. UP	525 Orang
3.	Boat 10-20 GT. UP	290 Orang

Tabel 1. Jumlah Nelayan Buruh di Gampong Lampulo, Banda Aceh.⁶

⁴ Regina Pamela Saroinsong, *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*, Media Neliti, jurnal tahun 2019

⁵ *Ibid* hal 28

⁶ Laporan Lembaga Adat Laot (Tahun) 2020

Menurut Observasi awal oleh peneliti didapati bahwa di Gampong Lampulo, berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan di atas juga telah ditemukan permasalahan yang kompleks yang berkaitan dengan kemiskinan nelayan, antara lain bahwa kebijakan pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat nelayan, belum dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket pemberian modal usaha seringkali tidak kena sasaran disebabkan karena program tersebut hanya bersifat sementara, karena sasaran program hanya mengurangi beban penduduk dari garis kemiskinan, sementara yang diharapkan adalah modal sosial dalam kesinambungan hidup mereka hingga mereka mampu mandiri, minimnya tingkat pendapatan nelayan yang disebabkan oleh akses produksi, peralatan masih bersifat sederhana, jangkauan usaha terbatas karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana tangkapan yang relatif kecil/minim, akses pasar masih dikuasai oleh para tengkulak yang disebabkan oleh besarnya ketergantungan nelayan, Sikap mental nelayan yang konsumtif, membuat mereka tak mampu meningkatkan usahanya. Selain itu dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan rendah serta faktor sosial budaya masyarakat terutama yang berkaitan dengan tradisi menangkap ikan melalui warisan nenek moyang mereka, minimnya masyarakat nelayan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan peningkatan usaha.

Di sisi lain, seharusnya Pemerintah perlu hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya seperti dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan matabat kemanusiaan”.⁷ Lebih lanjut seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh harus mampu menjamin kesejahteraan nelayan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara seperti yang dikutip dari literature review Regina Pamela Saroinsong, Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, media neliti, jurnal tahun 2019 yang memberikan bantuan sosial dan fasilitas untuk membantu kesejahteraan masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut kajian ini menarik untuk diteliti lebih mendalam dengan judul **Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kemiskinan Nelayan (Studi Kasus Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam)**

⁷ Rudy Hendra Pakpahan, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan nelayan di gampong Lampulo ?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di gampong Lampulo ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan nelayan di gampong Lampulo
- 2) Untuk Mengetahui faktor apa saja yang menjadi tantangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di gampong Lampulo

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2) Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Kemiskinan Nelayan